

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk ke empat terbesar di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Sedangkan negara kelima yang memiliki penduduk terbesar adalah Jepang. Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 277.858.332 jiwa per Desember 2021 berdasarkan *Worldometer*. Tentu saja hal ini menyebabkan Indonesia memiliki sumber daya manusia atau tenaga kerja yang melimpah, yang bisa disalurkan untuk mempercepat proses pembangunan Indonesia. Sumber daya manusia yang melimpah dan didukung oleh sumber daya alam yang juga melimpah merupakan modal yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya dari negara lain yang lebih maju dan makmur. Namun jumlah penduduk yang besar tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan, bahkan dapat menjadi beban bagi keberlangsungan pembangunan tersebut. Jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan sebagian penduduk yang berada pada usia kerja tidak memperoleh pekerjaan. Permasalahan di bidang kependudukan hampir dapat dipastikan akan menimbulkan permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Fenomena penduduk muda dengan laju pertumbuhan tinggi pada umumnya akan menghadapi permasalahan ketenagakerjaan, khususnya bagaimana menyediakan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang terus bertambah.

Pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan penambahan angkatan kerja telah menimbulkan masalah tersendiri. Dengan adanya ketidakseimbangan antara

jumlah penduduk yang terus bertambah hingga menumpuk pada usia produktif dan peningkatan jumlah angkatan kerja tanpa diikuti dengan penyediaan lapangan kerja akan mengakibatkan kesempatan kerja berkurang dan pengangguran semakin bertambah. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini sangat diperlukan agar banyak tenaga kerja yang terserap. Pelatihan kerja diselenggarakan untuk membekali dan meningkatkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas, dan kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha. Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja, semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Dan juga diperlukannya kebijakan penetapan upah yang melindungi pekerja, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, peran pemerintah dalam hal ini dilakukan dengan menetapkan upah minimum. Dalam menetapkan upah minimum, pemerintah harus berdasarkan kepada kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil (*Grow National Product*) di negara tersebut. Rostow (1996) membagi proses pembangunan menjadi lima tahap, yaitu tahap masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, lepas landas, bergerak kedewasaan, dan jaman konsumsi massal yang tinggi. Pada tahap lepas landas ditandai dengan

tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi, tabungan dan investasi pada periode ini efektif dan meningkat dari 5%-10% dari pendapatan nasional, terjadi perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi.

Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam makro ekonomi, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto. Harrod-Domar mengemukakan teori yang sangat melegenda bahwa untuk menumbuhkan suatu perekonomian dibutuhkan modal sebagai tambahan stok modal yang dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat.

Hal tersebut menuntut adanya investasi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian bangsa. Investasi sangat berpengaruh terhadap perkembangan produksi nasional suatu negara karena tersedianya stok modal yang menjadi faktor penting kelangsungan dunia usaha. Untuk itu, agar para investor tertarik untuk berinvestasi di Indonesia maka pemerintah perlu memperbaiki ekosistem investasi dengan mereformasi berbagai regulasi terkait perizinan. Seringkali peraturan satu dan lainnya bertentangan, hal ini kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum yang membuat investor enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Terkait hal

tersebut kemudian pemerintah menerbitkan *Omnibus Law* untuk mengatasi permasalahan Ketidakpastian Hukum Investasi.

Proses pembangunan ekonomi juga sering kali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi dan pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat agar dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih maju. Kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dilakukan haruslah mampu menyentuh dan dirasakan hingga masyarakat kecil. Pembangunan memiliki definisi yang luas yaitu suatu proses multidimensi yang mencakup adanya perubahan-perubahan yang penting di dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, struktur sosial, kesenjangan, pengangguran dan penanganan kemiskinan (Todaro, 2000). Keberhasilan sebuah pemerintahan dalam hal pembangunan dapat dinilai melalui dari seberapa jauh pemerintah mampu menciptakan dan menambah lapangan pekerjaan serta mengurangi jumlah pengangguran, dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru dan semakin bertambah akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja yang ada sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan peningkatan daya beli yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Purwanti, 2009).

Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang mengalami perkembangan. Pada mulanya struktur ekonomi Indonesia didukung oleh sektor pertanian, namun seiring perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, peranan sektor pertanian semakin berkurang dan digantikan oleh sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan dipandang sebagai sektor yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, sehingga dengan keunggulan industri pengolahan akan didapat nilai tambah yang tinggi, yang pada

akhirnya tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi lebih cepat terwujud. Sektor industri pengolahan hampir selalu mendapat prioritas utama dalam rencana pembangunan negara-negara sedang berkembang. Sektor industri pengolahan dijadikan sebagai sektor pemimpin (*leading sector*) yang berarti dengan adanya pembangunan industri akan memacu dan mengangkat sektor-sektor lainnya seperti sektor jasa dan sektor pertanian. Pembangunan ekonomi yang mengarah pada industrialisasi dapat dijadikan motor penggerak untuk memenuhi lapangan pekerjaan (Simanjuntak, 1998).

Tenaga kerja berperan penting terhadap kenaikan output produksi. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka proses produksi akan meningkatkan nilai output produksi. Dalam negara berkembang seperti Indonesia, industri pengolahan dipandang mampu mendorong perekonomian dengan didukung oleh sumber daya manusia yang melimpah, maka sektor industri pengolahan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang besar.

Tabel 1.1 Kontribusi Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2016-2020 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata %
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,90%	29,68%	28,97%	27,53%	29,76%	29,56%
2	Pertambangan dan Penggalian	1,24%	1,15%	1,16%	1,11%	1,05%	1,14%
3	Industri Pengolahan	13,41%	14,51%	14,68%	14,91%	13,61%	14,22%
4	Pengadaan listrik dan Gas	0,22%	0,25%	0,27%	0,28%	0,24%	0,25%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,20%	0,34%	0,38%	0,39%	0,38%	0,33%
6	Konstruksi	6,74%	6,72%	6,70%	6,74%	6,28%	6,63%

7	Perdagangan Besar dan Eceran	18,20%	18,57%	18,58%	18,77%	19,23%	18,67%
8	Transportasi dan Pergudangan	4,20%	4,18%	4,35%	4,39%	4,35%	4,29%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,28%	5,71%	6,15%	6,65%	6,65%	6,08%
10	Informasi dan Komunikasi	0,58%	0,68%	0,72%	0,72%	0,73%	0,68%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,46%	1,42%	1,44%	1,38%	1,21%	1,38%
12	Real Estate	0,30%	0,25%	0,31%	0,31%	0,31%	0,29%
13	Jasa Perusahaan	1,21%	1,37%	1,33%	1,51%	1,40%	1,36%
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,21%	3,79%	3,77%	3,84%	3,56%	3,83%
15	Jasa Pendidikan	5,14%	4,94%	4,88%	4,98%	4,69%	4,92%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,48%	1,47%	1,49%	1,54%	1,56%	1,50%
17	Jasa Lainnya	4,23%	4,96%	4,82%	4,94%	4,99%	4,78%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.1, sektor industri pengolahan yang berkontribusi paling besar terhadap perekonomian menempati posisi ke tiga dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia. Pada kenyataannya penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan kurang mampu untuk menyerap tenaga kerja yang tinggi. Dalam kurun waktu tersebut industri pengolahan mempunyai kontribusi rata-rata sebesar 14,22% terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2019 mampu berkontribusi sebesar 14,91%, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 13,61% artinya terdapat penurunan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 1,3%. Penurunan tersebut dikarenakan adanya Pandemi *Covid-19* yang membawa dampak yang signifikan terhadap aktivitas sektor industri, yaitu penundaan kontrak dan pembatalan pesanan, penurunan produksi dan penjualan, penyusutan permintaan, serta pengangguran tenaga kerja akibat penurunan

kapasitas produksi. Berbeda dengan sektor industri pengolahan, tenaga kerja sektor pertanian mengalami kenaikan selama pandemi *Covid-19* sebesar 2,23%, hal ini di karenakan adanya pemangkasan tenaga kerja di perkotaan yang akhirnya para pekerja memilih untuk kembali ke kampung dan menjadi petani.

Sektor yang menyerap tenaga kerja paling tinggi adalah sektor pertanian, kehutanan, perikanan itu dengan rata-rata sebesar 29,56%. Kemudian diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang menduduki posisi ke dua dapat menyerap tenaga kerja dengan rata-rata sebesar 18,67%. Sektor perdagangan besar dan eceran berperan guna memperlancar arus barang dan jasa, mengusahakan dan menjaga tingkat harga menjadi relatif stabil dan peningkatan nilai tambah yang dihasilkan serta kemampuannya menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

Adanya modal juga diperlukan dalam mengembangkan sektor industri agar perkembangannya dapat berjalan sesuai tujuan. Modal bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas yang lebih tinggi yang akan mengakibatkan keuntungan yang lebih besar, sehingga mempengaruhi proses investasi pada sektor yang satu atau lainnya. Salah satu sumber modal industri adalah dengan investasi, baik berupa penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Investasi dianggap sebagai variabel makro yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Usaha akumulasi modal dapat dilakukan dengan melalui kegiatan investasi yang akan menggerakkan perekonomian melalui mekanisme permintaan agregat, dimana akan meningkatkan usaha produksi dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan permintaan tenaga kerja (Sudarsono, 1998). Semakin tinggi investasi yang

ditanamkan, maka kapasitas untuk menyerap tenaga kerja akan semakin besar. Dan jika tenaga kerja bisa terserap, maka pendapatan juga akan meningkat.

Tabel 1.2 Realisasi Nilai Investasi Sektor Industri di Indonesia Tahun 2016-2020

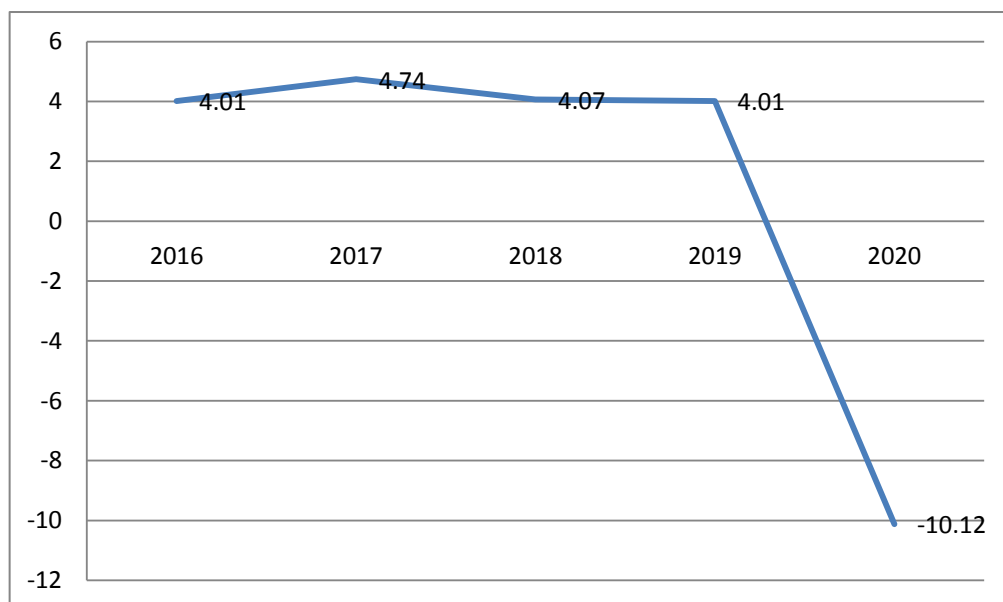
Tahun	INVESTASI (Rp. Juta)	Pertumbuhan
2016	106.783,70	19,92%
2017	99.187,40	-7,11%
2018	83.644,43	-15,67%
2019	72.673,42	-13,12%
2020	82. 817,80	13,96%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tabel 1.2, menunjukkan nilai investasi sektor industri dalam kurun waktu lima tahun. Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 realisasi investasi terus mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini dikarenakan adanya beberapa peristiwa antara lain penurunan harga komoditas yang berakibat pada adanya tekanan terhadap ekspor Indonesia dan menjadi penyebab investor yang semula mau menanamkan modal di Indonesia cenderung menunggu, akibatnya penanaman modal di dalam negeri melambat. Berikutnya, perlambatan ekonomi China sebagai entitas ekonomi terbesar dunia yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara global, perang dagang dengan Amerika Serikat yang menciptakan kembali ekonomi berbiaya tinggi dan mengganggu sisi permintaan. Pada tahun 2020 realisasi investasi di Indonesia mengalami kenaikan meski ditengah pandemi sebesar 13,96%. Sektor-sektor industri pengolahan yang menyettor nilai investasi secara signifikan antara lain, industri logam, industri makanan, industri kimia dan farmasi, industri mineral non logam serta industri

karet dan plastik. Penyebab utamanya dikarenakan adanya vaksin *Covid-19*. Ini berdampak pada kepercayaan diri penanaman modal. Dan adanya pengesahan Undang-Undang tentang Cipta Kerja juga memberi pengaruh positif bagi investor asing.

Pertumbuhan produksi menjadi faktor penting penyerapan tenaga kerja. Jumlah produksi adalah tingkat produksi atau keseluruhan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh industri. Untuk meningkatkan output, diperlukan peningkatan input yang dalam hal ini tenaga kerja. Semakin tinggi produktivitas tenaga kerja maka semakin tinggi pula jumlah produksi, begitu juga sebaliknya (Sumarsono, 2003). Naik turunnya permintaan pasar terhadap hasil produksi, akan berpengaruh apabila permintaan hasil produksi barang meningkat, maka perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya, sehingga penggunaan tenaga kerja juga bertambah.



Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Produksi Industri Pengolahan di Indonesia Tahun 2016-2020 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dapat dilihat dari Gambar 1.1 bahwa tahun 2016 terhadap tahun 2015 terjadi kenaikan pertumbuhan produksi industri pengolahan sebesar 4,01%. Kenaikan tersebut terutama disebabkan naiknya produksi industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional, naik 8,01%, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, naik 7,62%, dan industri makanan, naik 6,26%. Sedangkan industri yang mengalami penurunan produksi terbesar adalah industri karet, barang dari karet dan plastik, turun 8,39%, industri peralatan listrik, turun 7,49%, dan industri pakaian jadi, turun 7,15%.

Pada tahun 2017 terhadap tahun 2016, terjadi kenaikan pertumbuhan produksi industri pengolahan sebesar 4,74%. Kenaikan tersebut terutama disebabkan naiknya produksi industri makanan, naik 9,93%. Sedangkan industri yang mengalami penurunan produksi terbesar adalah industri pengolahan lainnya, turun 4,51%.

Pada tahun 2018 terhadap tahun 2017, terjadi kenaikan pertumbuhan produksi industri pengolahan sebesar 4,07%. Kenaikan tersebut terutama disebabkan naiknya produksi industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, naik 18,78%. Sedangkan industri yang mengalami penurunan produksi terbesar adalah industri komputer, barang elektronik dan optik, turun 15,06%.

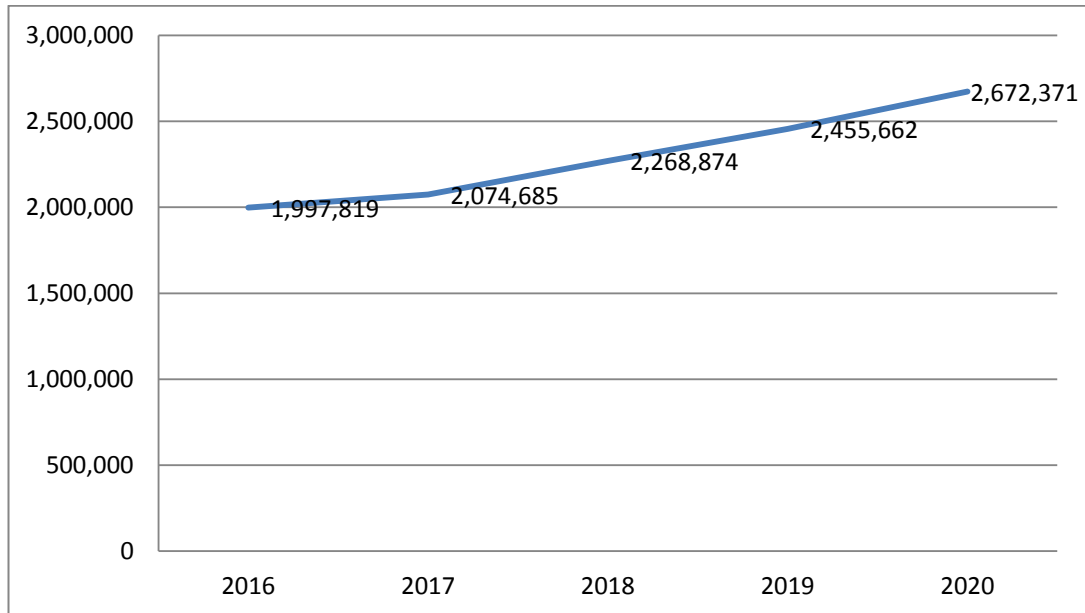
Pada tahun 2019 terhadap tahun 2018, terjadi kenaikan pertumbuhan produksi industri pengolahan sebesar 4,01%. Kenaikan tersebut terutama disebabkan naiknya produksi industri pencetakan dan reproduksi media rekaman, naik 19,58%. Sedangkan industri yang mengalami penurunan produksi terbesar adalah industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya, turun 18,49%.

Pada tahun 2020 terhadap tahun 2019, jika dibandingkan pertumbuhan produksi industri pengolahan turun lebih rendah sebesar -10,12%. Pertumbuhan negatif ini disebabkan penurunan produksi pada sebagian besar jenis industri dan juga menurunnya permintaan akibat pandemi *Covid-19*. Penurunan tersebut terutama disebabkan turunnya industri mesin dan perlengkapannya, turun 21,64%, industri komputer, barang elektronik dan optik turun 20,15%, industri furnitur turun 18,92%, dan industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya turun 18,42%. Sedangkan industri yang mengalami kenaikan produksi terbesar adalah industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional naik 14,61%, industri alat angkut lainnya naik 9,77%, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan naik 5,70%, dan industri kendaraan bermotor naik 4,10%.

Upah minimum juga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yang sudah banyak digunakan negara-negara di dunia terutama Indonesia. Pasal 88 ayat (1) bab 10 tentang pengupahan pada UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 adalah pengaturan yang mengatur kebijakan upah minimum Indonesia. Upah minimum memiliki tujuan dalam pelaksanaannya untuk meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Upah minimum juga bisa menjadi penjamin untuk suatu perusahaan agar produktivitas pekerja tetap terjaga.

Dalam teorinya, harga pekerja digambarkan pada tingkat upah yang berlaku. Dimana antara banyaknya pekerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan sebagai tenaga kerja kerjanya dengan tingkat upah yang berlaku adalah gambaran dari suatu permintaan terhadap tenaga kerja (Sudarsono, 1990). Dalam penerapannya di Indonesia, penetapan upah minimum dapat dilakukan

dalam wilayah provinsi dan wilayah kota atau kabupaten. Tingkat rata-rata upah minimum provinsi se-Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 1.2 Rata-Rata Upah Minimum Provinsi Se-Indonesia Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada gambar 1.2, dimana pada tahun 2016 sebesar Rp1.997.819, pada tahun 2017 Rp2.074.685, pada tahun 2018 Rp2.268.874, kemudian Rp2.455.662 pada tahun 2019, dan Rp2.455.662 pada tahun 2020.

Tentu saja kenaikan tersebut adalah salah satu wujud untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat atau untuk mengurangi kesenjangan. Akan tetapi, adanya kenaikan tingkat upah, akan menaikkan biaya produksi perusahaan yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan harga. Kenaikan harga menyebabkan, pembeli berkurang, berkurangnya produksi dan akhirnya berkurangnya permintaan tenaga kerja atau disebut *scale effect*. Pengusaha akan mengurangi jumlah tenaga kerja agar dapat mempertahankan keuntungan yang maksimum.

Berdasarkan latar belakang dan fakta-fakta yang telah diuraikan, sehingga

judul penelitian yang diambil penulis adalah **“Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Produksi, Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Studi Kasus Pada Industri Pengolahan Di Indonesia Tahun 2001-2020).**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis dapat mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Produksi, dan Investasi secara parsial terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan di Indonesia Tahun 2001-2020?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Produksi, dan Investasi secara bersama-sama terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Pengolahan di Indonesia Tahun 2001-2020?
3. Bagaimana elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Pengolahan terhadap Upah Minimum, Pertumbuhan Produksi, dan Investasi di Indonesia Tahun 2001-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Produksi, dan Investasi secara parsial terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Pengolahan di Indonesia Tahun 2001-2020?
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Produksi, dan Investasi secara bersama-sama terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Pengolahan di Indonesia Tahun 2001-2020?

3. Untuk mengetahui elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Pengolahan terhadap Upah Minimum, Pertumbuhan Produksi, dan Investasi di Indonesia Tahun 2001-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil peneliiian yang diperoleh diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini meningkatkan pengetahuan mengenai penyerapan tenaga kerja di Indonesia terutama di sektor industri pengolahan.
2. Bagi pemerintah, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan informasi dalam mengembangkan sektor industri pengolahan dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan, wawasan, dan informasi kepada masyarakat terutama pekerja sektor industri pengolahan.
4. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi guna penelitian yang sejenis.

1.5. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan menggunakan data sekunder yang diakses melalui website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

1.5.2. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal pelaksanaan penelitian digambarkan sebagai berikut:

